

PERANAN KELOMPOK KERJA MADRASAH (KKM) SEBAGAI SKOCI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Abdul Kholid Achmad
Universitas Muhammadiyah Gresik
e-mail : abdckholidachmad@umg.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the role of the Madrasah Working Group (KKM) in accordance with the Decree of the Directorate General of Islamic Religious Education Number 5852 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the KKM. The research was conducted with a qualitative descriptive case study type approach. The research findings show that the role of KKM can be optimal by using several programs and activities as follows: (1) sharing strategies among madrasah principals on best practices, (2) implementing inter-institutional benchmarking as part of honing, compassion and fostering, (3) making programs periodic collective evaluation (cognitive and psychomotor) to get superior seeds through programs and activities as well as a show-a-force institutional promotion, and (4) fostering and enhancing the professionalism of madrasah principals through programmed KKM on an ongoing basis by referring to the results of the evaluation conducted by the madrasah supervisor. Through KKM, efforts can be made to improve the quality of Islamic education whenever it is carried out programmatically and continuously based on evaluation data.*

Keywords. *Madrasah Working Group; Quality Improvement; Islamic Education; Madrasah*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 5852 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKM. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif jenis studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peranan KKM dapat optimal dengan menggunakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: (1) sharing strategi antar kepala madrasah terhadap best practice, (2) pelaksanaan benchmarking antar lembaga sebagai bagian dari asah, asih dan asuh, (3) pembuatan program evaluasi secara kolektif (kognitif dan psikomotorik) secara priodik untuk mendapatkan bibit-bibit unggul melalui program dan kegiatan sekaligus sebagai ajang promosi kelembagaan yang dilakukan secara bersama (show a force), dan (4) pembinaan dan peningkatan profesionalisme kepala madrasah melalui KKM yang diprogramkan secara berkesinambungan dengan merujuk pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengawas madrasah. Melalui KKM Peningkatan mutu pendidikan Islam dapat diupayakan manakalah dilakukan secara terprogram dan terus menerus berbasis data hasil evaluasi.*

Kata Kunci. *Kelompok Kerja Madrasah; Peningkatan Mutu; Pendidikan Islam*

Copyright © JMPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. All Right Reserved.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

A. PENDAHULUAN

Mutu memberikan gambaran kepada khalayak umum bahwa produk barang atau jasa dari lembaga atau perusahaan memiliki nilai tambah atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam ranah pendidikan standar ditetapkan dalam

Permendiknas Nomor 20 tahun 2003 yang terperinci dalam 8 standar pendidikan yakni: standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian, standar proses, standar isi, standar pengelolaan dan standar kelulusan. Sedangkan nilai tambah adalah kepuasan pelanggan pendidikan terhadap pemenuhan standar yang dilakukan melalui inovasi dan kreativitas dari standar yang ditetapkan untuk memenuhi mutu pendidikan. Nilai tambah pada pendidikan Islam ditunjukkan dengan *output* keluaran yang memiliki keilmuan yang tinggi, mendalam dan luas sedangkan dalam *outcomenya* ditunjukkan dengan lulusan yang berkarakter, mandiri, bertanggungjawab, disiplin, dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berkenaan dengan mutu pendidikan Islam khususnya madrasah, hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar terhadap mutu pendidikan Islam khususnya madrasah.

Permasalahan mutu pendidikan Islam khususnya Indonesia masih menjadi konsentrasi para *stakeholder* pendidikan. Mutu pendidikan yang rendah menjadi petaka bagi masyarakat misalnya kemiskinan (Permana, 2012). Mutu pendidikan juga diukur oleh masyarakat dari minimnya kenakalan remaja, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, bunuh diri, hamil diluar nikah, pembunuhan (Kusramhadi, 2007) dan pelanggaran etik dan moral serta demoralisasi lainnya (Trisnawati, 2020), (Faturaba, 2020). Rendahnya kualitas pendidikan secara langsung ataupun tidak, mempengaruhi rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dihadapkan pada era globalisasi, era 4.0, kecakapan abad 21 (*21 Century Skill*), era digital (*digital age*) serta sekaligus berdampak pada rendahnya produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah memiliki kewajiban untuk berupaya meningkatkan mutu sebagai salah satu bagian pendidikan Islam dengan melakukan pembenahan dan perbaikan sebagai pembentuk karakter siswa yang mandiri, terampil dan berdaya saing. Madrasah sebagai salah satu bagian pendidikan Islam dituntut untuk menjadi lembaga yang konservatif terhadap perkembangan zaman diharapkan mampu mengikis persoalan-persoalan demoralisasi tersebut sebagai akibatkan dari rendahnya mutu pendidikan (Fauzi, 2020).

Menilik pada IPM versi UNDP atau dikenal dengan *Human Development Indek* (HDI), Indonesia peringkat 6 ASEAN dan 111 di dunia dari 189 negara. Pada kawasan Asia Tenggara Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Indonesia unggul dari Thailand pada aspek Rentang Lama Sekolah (RLS). Sedangkan dengan Filipina Indonesia unggul dalam semua aspek kecuali ratta-rata lama waktu mengenyam pendidikan (TIM Riset CNBC, 2020).

Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada Desember 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Education Index dari Human Development Reports (2017) menyebut Indonesia di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura (0,832), Malaysia (0,719), Brunei Darussalam (0,704), Thailand dan Filipina sama-sama memiliki skor 0,661. Ini hanya menegaskan. Bahwa indeks pendidikan yang rendah jadi sebab daya saing pun lemah (Syarif, 2020). Sedangkan dalam bidang Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian yang menunjukkan capaian kognitif siswa MA dalam pembelajaran PAI relatif sudah cukup baik dengan nilai 78 sampai 80, aspek psikomotorik diukur dari 3 aspek perilaku juga cukup baik, terutama dalam ritual ibadah keagamaan, namun pada 2 aspek perilaku siswa lainnya masih perlu perbaikan. Pada

hasil capaian aspek afektif dilihat dari lima rumpun bidang isu pelajaran PAI masih kurang berhasil (Sumarni, 2013).

Telah diketahui bersama bahwa dalam surah Q.s. An Nisa' ayat 9 memberikan gambaran yang tegas bagaimana apabila meninggalkan keturunan yang lemah secara pendidikan, ekonomi, dan kesehatan). Artinya; *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan sudah semakin banyak dengan peningkatan kualitas guru (Kemendikbud, 2020), peningkatan kualitas kepala sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana (Rahmawati, 2019), pemerataan akses belajar, peningkatan pembiayaan, dan lain-lain. Namun peningkatan tersebut belum begitu terasa dampaknya terhadap mutu pendidikan khususnya madrasah.

Jumlah madrasah di wilayah Lamongan terhitung banyak yakni: Madrasah Ibtidaiyah (MI) 538 lembaga, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 184 lembaga dan Madrasah Aliyah (MA) 86 lembaga dengan jumlah total 808 Lembaga (Referensi Data Sekolah Kemendikbud, 2020). Meskipun secara kuantitas madrasah di Lamongan secara kelembagaan tercatat sebagai dengan sebaran yang banyak mulai dari jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) namun belum menandakan kualitas dari banyaknya lembaga tersebut. Peningkatan kualitas madrasah dibutuhkan kerja keras oleh seluruh *stakeholder* internal maupu eksternal dengan komando pimpinan pada lembaga pendidikan yakni kepala madrasah. Oleh karenanya dibutuhkan kepala madrasah yang visioner dan memiliki kapasitas secara kepribadian, manajerial, social dan professional.

Untuk menjawab masalah-masalah di atas, dibutuhkan skoci (Wikipedia. 2020) perubahan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 pasal 47 ayat 4 tentang Kelompok kerja madrasah dan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasa 1 ayat 4 tentang kompetensi kepala madrasah. Sebagai tindak lanjut peranan KKM sebagai skoci perubahan mutu madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020 mengeluarkan Petunjuk Teknis Penyelenggraan Kelompok Kerja Madrasah Nomor 5852 tahun 2020.

Kepala madrasah memiliki peran utama dan posisi strategis dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Sebagai pimpinan lembaga pendidikan kepala madrasah yang urgen sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2007 tentang Kepala Madrasah sebagaimana dirubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pimpinan madrasah memiliki tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan melakukan supervise kepada guru dan tenaga kependidikan (Dirjen Pendis, 2020). Makna peranan sebagaimana pandangan Stoner dan Freeman (Usman, 2014) adalah bentuk-bentuk prilaku yang diharapkan pada setiap orang untuk menjalankan fungsinya di dalam suatu organiasasi.

Banyak peranan yang dimainkan kepala madrasah di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Secara yuridis, peranan kepala sekolah/madrasah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah sebagai *Educator* (pendidik), *Manager*

(pengelola), *Administrator* (pengadministrasi), *Supervisor* (penyelia), *Leader* (pemimpin), *Entrepreneur* (pengusaha), dan *Climate creator* (pencipta iklim) (Kemendiknas, *tt*).

Dengan peranan dan fungsi yang demikian, diperlukan peningkatan kompetensi yang secara terus menerus bagi kepala madrasah melalui berbagai kegiatan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan mutu madrasah secara kelembagaan, siswa, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah. Hal tersebut berdasarkan fakta di lapangan bahwa madrasah yang bermutu dipimpin oleh kepala madrasah yang visioner dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Untuk menjaga konsistensi sebagai pembelajar dalam rangka peningkatan kompetensi, kepala madrasah tidak bisa sendiri dan memerlukan kelompok profesi agar dapat saling bersinergi untuk memberikan dukungan dan motivasi. Dilingkungan Kementerian Agama kepala madrasah diberikan ruang kelompok kerja kepala madrasah melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagaimana halnya sekolah yang ada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan sebutan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Kelompok Kerja Madrasah sebagai forum kepala madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 pasal 47 ayat 4 yaitu: peningkatan kompetensi kepala madrasah dan mengkoordinasikan serta mensinergikan program peningkatan mutu madrasah. Kompetensi kepala madrasah sebagaimana dimaksudkan adalah kompetensi kepribadian, majerial, kewirausahaan, supervisi, sosial dan profesional. Dengan kompetensi tersebut kepala madrasah dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta tanggungjawab dalam peningkatan mutu madrasah yang dipimpinnya. Kompetensi dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasa 1 ayat 4 diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang diperlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu (UU Guru dan Dosen, 2005) dan diakui dengan sertifikat pendidikan profesi (Permenag, 2017).

Pembentukan Kelompok Kerja Madrasah pada tingkatan kecamatan sebagai bagian dari Kelompok Kerja Madrasah yang dibentuk oleh Kementerian Agama pada masing-masing Kabupaten memiliki program dan kegiatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain sebagai wadah pembinaan, tukar informasi dan rapat yang telah menjadi rutinitas. KKM Kecamatan juga sebagai wadah bagi para kepala madrasah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan evaluasi pembelajaran melalui berbagai bentuk perlombaan (*psikomotorik*) dan olimpiade-olimpiade mata pelajaran (*kognitif*).

Realita di lapangan menunjukkan bahwa Kelompok Kerja Madrasah hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kedinasan seperti rapat, sosialisasi, pengarahan dari pengawas, penyeteroran berkas sertifikasi guru dan kegiatan administrative lainnya. Fungsi peningkatan profesionalisme dan koordinasi peningkatan mutu sebagaimana tujuan dibentuknya KKM belum banyak dilakukan. Hal itu menjadi alasan penelitian ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi Kelompok Kerja Madrasah dan Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi dengan harapan dapat merubah praktik-praktik di lapangan terhadap kinerja Kelompok Kerja Madrasah yang pada akhirnya memberikan sumbangsih terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian tentang peranan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) terhadap mutu pendidikan Islam bukanlah dari ruang kosong yang tanpa sebab. Kajian tentang KKM belum banyak dilakukan oleh peneliti sebagaimana hasil penelusuran pada mesin indeks Google Cendikia. Adapun beberapa penelitian terkait seperti Taufiq (2016) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peran KKM menemukan bahwa perencanaan diprogramkan dengan baik dengan kinerja cukup baik namun dalam evaluasi masih terdapat beberapa program belum terealisasi dan program kinerja memiliki pengaruh terhadap kualitas Madrasah Tsanawiyah. Herman (2013) dengan pendekatan yuridis, pedagogis dan manajemen menyimpulkan bahwa KKKM secara efektif digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan ditandai dengan adanya hubungan silaturahmi, peningkatan kegiatan guru, peningkatan jumlah siswa dan wadah komunikasi dan informasi. (Handayani, 2018) dengan pendekatan penelitian tindakan yang menggunakan analisis presentase pada 3 sekolah binaan dengan temuan penelitian bahwa Kelompok Kerja Kepala Madrasah berbasis pendampingan dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam penyusunan program supervisi dengan hasil rata-rata pada siklus I adalah 73.17 dengan kategori cukup dan pada siklus II adalah 84.29 dengan kategori baik. Dari ketiga penelitian tersebut belum memberikan gambaran secara utuh peranan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dalam peningkatan mutu pendidikan Islam sebagaimana harapan dibentuknya KKM dengan petunjuk teknik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020, sehingga penelitian ini menjadi jawaban strategi alternative yang dapat digunakan oleh kepala madrasah sebagai bagian dari peningkatan mutu madrasah.

B. METODE

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan dan strategi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dalam peningkatan mutu madrasah sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 5852 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berusaha menemukan peranan dan strategi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagai skoci dalam peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya di kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Terdapat 10 madrasah ibtidaiyah (MI) yakni (1) MI Minhajul Huda, (2) MI Islamiyah, Buden (3) MI Darul Ulum, (4) MI Islamiyah, Dinoyo, (5) MI Hidayatus Sibyan, (6) MI Bahrul Ulum, (7) MI Al Hidayah, (8) MI Bustanul Ulum, (9) MI Miftahul Ulum, dan (10) MI Nurul Qomar, yang dijadikan sebagai subyek penelitian ini dengan status swasta dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen selama 3 bulan sejak Agustus-Oktober 2020.

Sumberdata dari penelitian ini adalah kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Untuk menganalisis data, penelitian ini menerapkan analisis sebagaimana Milles dan Hubberman yang meliputi tiga tahap, *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification*. Untuk keabsahan temuan penelitian digunakan triangulasi sumber data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lamongan dengan luas 1.812,8 km² yang berada di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah madrasah tertinggi di Indonesia. Dengan bentangan luasnya area Lamongan dan banyaknya madrasah diwilayah ini, mutu madrasah menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan isu pada kepentingan tertentu.

Banyaknya madrasah di Lamongan dengan berbagai jenjang MI, MTs dan MA pada 27 kecamatan dengan mutu yang bervariasi, terdapat di dalamnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kecamatan Deket dengan 10 lembaga yang memiliki mutu berbeda, baik pada aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Pada aspek kuantitas ditunjukkan dengan jumlah siswa pada masing-masing madrasah yakni sebagai berikut:

Table 1. Jumlah siswa MI se-Kecamatan Deket tahun 2020/2021

No	Nama Lembaga	Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	MI Minhajul Huda	13	13	13	15	13	9	76
2	MI Islamiyah, Buden	12	14	12	20	9	15	82
3	MI Darul Ulum	13	11	9	7	16	5	61
4	MI Islamiyah, Dinoyo	22	25	23	20	23	17	130
5	MI Hidyatus Sibyan	32	39	42	40	44	51	247
6	MI Bahrul Ulum	8	9	15	8	15	14	69
7	MI Al Hidayah	6	1	3	4	6	5	25
8	MI Bustanul Ulum	7	8	13	9	13	16	66
9	MI Miftahul Ulum	80	65	71	61	45	35	357
10	MI Nurul Qomar	1	1	2	0	2	2	8
Jumlah								1122

Sumber : Dokumen Data Penerima BOS Kec. Deket Tahun 2020/2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mutu yang diperlihatkan secara kuantitas siswa pada madrasah ibtidaiyah wilayah Kecamatan Deket. Pada lokasi tertentu memiliki jumlah siswa yang cukup banyak sedangkan pada lokasi lainnya memiliki jumlah siswa sedang dan beberapa lokasi memiliki siswa yang sangat sedikit. Kuantitas siswa menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah dalam pemilihan lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka. Semakin banyak jumlah siswa menandakan semakin banyaknya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah itu sendiri.

Kuantitas siswa masih merupakan titik acuan untuk merefleksikan keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan. Kualitas menjadi tolak ukur yang memiliki hubungan dengan kemampuan atau kecerdasan peserta didik. Sedangkan kuantitas menyangkut tolak ukur yang memiliki kaitan dengan angka atau jumlah siswa, keterpenuhan sarana dan prasarana (Umam, 2019).

Kepercayaan orang tua siswa untuk menitipkan pendidikan anak mereka adalah mutu pendidikan yang diperlihatkan oleh pengelola lembaga dengan memiliki program unggulan (tahfizd Al Qur'an, *Outbond*, Perkemahan, Hadrah (Sidaq, 2019)), kegiatan yang menarik dan prestasi siswa, guru, lembaga (Suliadi, 2020). Persaingan dengan Sekolah Dasar (SD) pada masing-masing lokasi juga menjadi poin terkait dengan beragamnya jumlah siswa. Namun strategi kepala madrasah dalam menanggapi persaingan tersebut menjadikan orang tua masih memilih untuk menitipkan

pendidikannya. Strategi-strategi itulah yang kemudian seharusnya menjadi topik kajian pada pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) agar dapat memberikan inspirasi dan masukan penggunaan strategi dari kepala madrasah kepada kepala madrasah lainnya pada wilayah mereka ditugaskan.

Pelaksanaan strategi diperlukan kompetensi manajerial dan gaya kepemimpinan kepala madrasah yang fleksibel. Kepala madrasah dengan pengetahuan tentang manajerial, akan memiliki banyak alternatif sebagai jalan keluar untuk menarik siswa memilih lembaga yang mereka pimpin melalui pembuktian prestasi, program unggulan, komunikasi *stakeholders* internal dan eksternal serta pelibatan lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Adapun dengan gaya kepemimpinan yang fleksibel (intruktif, konsultatif dan partisipatif) adalah gaya kepala madrasah dalam melakukan pendekatan melalui komunikasi yang efektif pada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendukung peningkatan mutu madrasah (Achmad, 2016).

Strategi *benchmarking* antar lembaga dalam wilayah Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dapat menjadi alternatif bagi kepala madrasah yang masih tertinggal mutu pendidikannya. Dengan kegiatan tersebut kepala madrasah dengan tim pengelola lainnya mendapatkan pengetahuan, pencerahan dan masukan untuk diaplikasikan di madrasah masing-masing bersama tenaga pendidik dan kependidikan lainnya (Kurniawan, 2020). Pelaksanaan *benchmarking* menjadi kegiatan asah, asih dan asuh antar lembaga perihal kekurangan dan kelebihan masing-masing serta bertukar pengalaman (*best practice*) dalam peningkatan mutu madrasah. Dengan mengkoordinasikan kegiatan tersebut diharapkan madrasah yang memiliki keunggulan tertentu pada aspek program dan kegiatan yang dapat diduplikasikan ke madrasah lain yang masih memiliki mutu standar atau kurang.

Sedangkan mutu pada aspek kualitas sebagaimana dimaksudkan adalah output pendidikan yang dikaji dari hasil perolehan prestasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional oleh madrasah baik siswa, guru dan lembaga pendidikan itu sendiri. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kecamatan Deket, belum mendapatkan pengakuan tingkat Provinsi maupun Nasional khususnya pada ajang perlombaan-perlombaan bagi siswa/guru maupun lembaga. Prestasi yang didapatkan masih seputar tingkat Kabupaten dengan peserta di lingkungan madrasah.

Prestasi bagi guru dan kelembagaan juga masih belum ditunjukkan, dengan keterbatasan kompetisi yang terbuka (*informative*) kepada kepala madrasah (Suliadi, 2020). Khusus bagi guru bahkan belum ada kegiatan perlombaan sebagai ajang untuk pembuktian profesionalisme dalam pembelajaran (*pedagogic*), ataupun kompetisi yang bersifat pengukuran literasi dan lainnya (Kholil, 2020).

Mutu pada aspek luaran (*output*) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Deket Kabupaten Lamongan, masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 yakni: "*pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*".

Mutu secara prestasi belum banyak didapatkan oleh siswa/guru/lembaga dikarenakan kurangnya ajang-ajang kompetisi yang diadakan tingkat kecamatan,

kabupaten maupun provinsi (Kholil, 2020). Belum adanya program di tingkatan KKM Kabupaten yang diderivasi ke KKM Kecamatan untuk mengevaluasi mutu pendidikan dengan kompetisi baik secara kognitif maupun psikomotorik (Riduwan, 2020). Kurangnya orientasi KKM terhadap pembuatan program kompetisi sebagai ajang evaluasi mutu siswa/guru/lembaga (Musta'in, 2020).

Prestasi akademik sebagaimana ditunjukkan dari hasil kejuaraan perlombaan pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional adalah sebagai hasil pemerataan mutu pendidikan (Kemendikbud, 2019). Dengan perlombaan siswa, guru dan lembaga pada ajang tertentu sebagai bentuk cerminan evaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan madrasah pada siswanya.

Mutu siswa sebagai cerminan hasil proses pendidikan madrasah yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dengan penggunaan metode, pendekatan dan strategy pembelajaran oleh guru dalam proses pembelajaran. Mutu siswa sebagaimana standar kompetensi lulusan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pada Pasal 35 disebutkan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu siswa khususnya pendidikan Islam (madrasah) bukan hanya ditunjukkan dengan tingginya prestasi akademik namun juga perilaku siswa (akhlak) sebagai bagian dari outcome proses pendidikan.

Mutu guru menjadi kunci mutu siswa, dalam proses pendidikan siswa diperlakukan oleh guru dengan kompetensi yang dimiliki dalam pembelajarannya untuk mendapatkan pengetahuan melalui proses transformasi dengan pendekatan dan strategi yang berbeda. Mutu guru adalah profesionalisme guru, sebagaimana UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (UU Guru dan Dosen, 2005). Dengan kedudukan dan fungsi sebagaimana undang-undang tersebut maka mutu siswa bergantung terhadap mutu guru pada lembaga pendidikan Islam (madrasah).

Adapun mutu secara kelembagaan adalah cerminan dari keterpenuhan dan ketercapaian standar pengelolaan pada lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh kepala madrasah. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh lembaga dalam bentuk pengakuan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional membuktikan pengelolaan pada lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kriteria standar pengelolaan yang tercantum dalam Permendiknas No 20 tahun 2003 maupun melebihi standar. Pada aspek ini seringkali lembaga khususnya lembaga pendidikan Islam (madrasah) hanya berfokus pada nilai akreditasi yang adakan 5 tahunan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan mengesampingkan pengakuan aspek lainnya seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Adiwiyata, Sekolah UKS, dan lainnya.

Diperlukan agenda yang terprogram dan berkelanjutan oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk perlombaan-perlombaan sebagai bagian dari strategi evaluasi dan pembibitan siswa unggulan yang

siap untuk berlomba pada jenjang kabupaten maupun provinsi dan nasional (Borneo, 2018). Perlombaan kognitif bisa dilakukan dengan Olimpiade Sains, Olimpiade Mata Pelajaran, Kompetisi Siswa Madrasah, Cerdas Cermat, Lomba LKTI, Bercerita (*telling story*), Santri Cerdas, dan lain-lain. Sedangkan perlombaan untuk pada aspek psikomotrik siswa dapat seperti lomba lari, voly, sepak bola, lompat jauh, dan cabang olahraga lainnya sesuai dengan sarana dan prasarana diwilayah kecamatan maupun kabupaten yang dapat mendukung keterlaksanaan kegiatan. Kegiatan perlombaan sebagai ajang evaluasi dan pembibitan dilakukan secara terus menerus yang diinisiasi KKM, hasil dari kegiatan tersebut sebagai bagian dari persiapan manakalah pada tingkat kabupaten dan provinsi memiliki kegiatan yang serupa.

Pelaksanaan kegiatan perlombaan pada lembaga pendidikan secara bergantian juga menjadi ajang *show of force* kepada masyarakat sekitar. Adanya kegiatan perlombaan sebagai ajang kompetisi antar lembaga, setidaknya lembaga yang digunakan/ditempati ajang kompetisi mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat dimana madrasah berada serta menjadi nilai jual bagi lembaga dalam memberikan otonomi positif yang berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat kepada madrasah.

Evaluasi dalam bentuk perlombaan juga diprogramkan untuk guru (lomba penerapan strategy pembelajaran K13, lomba KTI) dan lembaga (lomba perpustakaan, lomba kebersihan, lomba kesehatan lingkungan, lomba kreatifitas pengelolaan kelas, dan lain-lain). Dengan adanya ajang bagi guru dan lembaga, dimungkinkan madrasah dapat menstimulus warga madrasah untuk selalu melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*).

Prestasi siswa/guru/lembaga menjadi ukuran mutu pendidikan Islam sebagai hasil proses pendidikan dan pengelolaan madrasah. Ajang kompetisi pada tingkatan kecamatan, kabupaten dan provinsi serta nasional adalah sebagai tolak ukur hasil proses mutu pendidikan pada aspek jaminan lulusan (*assurance*) (Maisaroh, 2005) yang dapat berdaya saing baik secara kognitif maupun psikomotorik.

Sebagaimana program dan kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Deket yang disajikan pada table C.3, belum terlihat program penguatan kompetensi kepala madrasah dan kordinasi mutu antara lembaga yang direncanakan secara priodik dan sistematis untuk mendukung peningkatan mutu madrasah.

Tabel 2. Program Kegiatan KKM Kec. Deket tahun 2020/2021

No	Nama Program/Kegiatan	Priode waktu			
		Mingguan	Bulanan	Semester	Isidental
1	Rapat Kepala Madrasah		√	√	
2	Pembinaan Pengawas		√	√	√
3	Sosialisasi				√
4	Rapat Isidental				√

Sumber: Dokumen Program KKM Kecamatan Deket Tahun 2020/2021

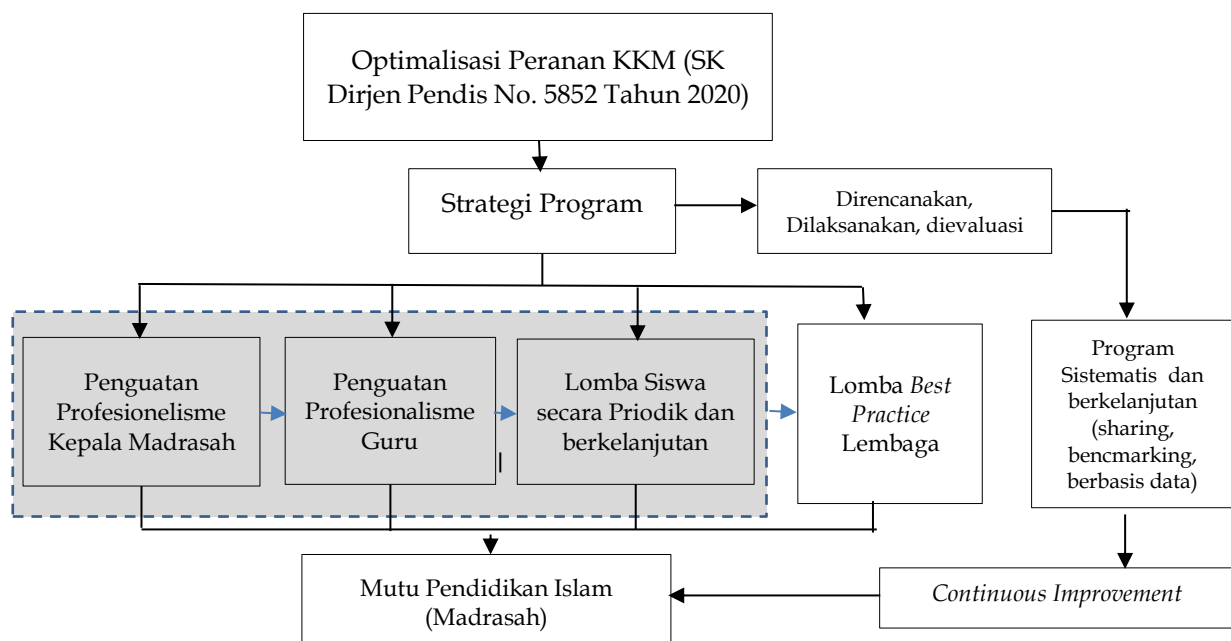
Persaingan mutu dengan sekolah dasar (SD) yang berjumlah 23 lembaga se-kecamatan Deket dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Referensi Data Kemendikbud, 2020) maka madrasah tidak dapat lagi bersantai untuk tidak meningkatkan mutu pendidikannya (Wardayanti, 2016). Karena dengan semakin

luasnya paradigma orang tua terhadap kualitas pendidikan, tantangan lingkungan (Hadi, 2015), keberlakuan era 4.0 dan kompetisi antara lembaga pendidikan (Efferi, 2014), menjadikan pemenuhan mutu pendidikan tidak dapat lagi dielakkan. Sedangkan factor kharismatik pimpinan, ketokohan personal, kelompok keagamaan, etnis, dan kelompok tertentu seyogyanya bukanlah lagi menjadi senjata utama kepala madrasah untuk menunjukkan mutu pendidikan. Namun kualitas proses yang berupa *output* dan *outcome* siswa sebagaimana visi dan misi serta tujuan pendidikan Islam dan nasional harus menjadi tolak ukurnya.

Dari program sebagaimana tabel di atas, belum terlihat program peningkatan profesionalitas yang diinisiasi dan diprogramkan secara terstruktur dan direncanakan secara sistematis oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) wilayah Kecamatan Deket sebagai upaya peningkatan mutu madrasah. Peningkatan profesionalitas kepala madrasah yang terstruktur dan dilakukan secara terus menerus akan membentuk paradigma baru kepala madrasah terhadap pengelolaan madrasah. Aspek manajerial, social, kepribadian dan supervisi (Handayani, 2018) yang menjadi kegiatan harian kepala madrasah adalah aspek yang menjadi garapan oleh KKM untuk menjadi perhatian dalam peningkatan profesionalisme melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan pengadaan kegiatan peningkatan profesionalisme guru setidaknya berbasis data sebagaimana hasil evaluasi pengawas pendidikan tingkat kecamatan agar sejalan dan berkesesuaian dengan data.

Dari hasil dan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan bahwa peranan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagai skoci peningkatan mutu pendidikan Islam (madrasah) adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Optimalisasi Peran KKM sebagai skoci Peningkatan Mutu Pendidikan Islam



D. KESIMPULAN

Peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya madrasah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peranan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sebagai skoci perubahan peningkatan mutu pendidikan Islam (madrasah) sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 5852 tahun 2020 dengan berbagai strategi yakni: (1) sharing strategi antar kepala madrasah terhadap *best practice* masing-masing kepala madrasah, (2) pelaksanaan *benchmarking* antar lembaga sebagai bagian dari asah, asih dan asuh, (3) pembuatan program evaluasi secara kolektif ranah *kognitif dan psikomotorik* secara priodik untuk mendapatkan bibit-bibit unggul melalui program dan kegiatan sekaligus sebagai sebagai ajang promosi kelembagaan yang dilakukan secara bersama (*show a force*), dan (4) pembinaan dan peningkatan profesionalisme kepala madrasah melalui KKM yang diprogramkan secara berkesinambungan dengan merujuk pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengawas pendidikan. Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam hal lokasi sehingga alternative-alternatif optimalisasi peranan KKM dalam lingkup lainnya mungkin bisa dilanjutkan oleh penelitian sejenis dan dapat menyempurnakan penelitian ini.

REFERENSI

- A. Taufiq. (2016) *Manajemen Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah 02 Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Madrasah Tsanawiyah Di Jepara Tahun 2015*. Master thesis, UNISNU Jepara.
- Achmad, Abdul Kholid. (2016) "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 1.2, 115-127. DOI: <https://doi.org/10.18860/jmpi.v1i2.3957>
- Borneo, (2018) <https://www.borneonews.co.id/berita/87655-osk-berdampak-untuk-peningkatan-mutu-pendidikan>
- Efferi, Adri. "Dinamika Persaingan Antar Lembaga Pendidikan." *Quality 2.1* (2014): 96-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v2i1.2095>
- Edwar Sallis. (2002) *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page Limited), 57.
- Fattah, Nanang. (2012) *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam konteks Penerapan MBS*, PT Remaja Rosdakarya Bandung. 3
- Herman, Herman (2013) *Efektifitas Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hadi, Nur. (2015) "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Orang Tua Memilih Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Nurul Fikri Sukodono Sidoarjo." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 3.3
- Handayani, Tutik. (2018) "Peningkatan Kemampuan Kepala Madrasah dalam Menyusun Program Supervisi Pendidikan melalui Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKM) Berbasis Pendampingan di Madrasah Binaan." *Jurnal Kependidikan* 6.1, 107-122. DOI: <https://doi.org/10.24090/jk.v6i1.1693>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020) <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/agenda-kegiatan>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/olimpiade-sains-nasional-jadi-ajang-pendidikan-karakter>
- Kharis, Anwar (2008) *Peran Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) dalam pengembangan sistem evaluasi hasil pembelajaran pada pendidikan madrasah diniyah: studi terhadap KKMD Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tahun 2007*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah. *pdf*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. *pdf*
- Kusrahmadi, Sigit Dwi. (2007) "Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar." *Dinamika Pendidikan* : 118-129.
- Kurniawan, Asep. "Penerapan Benchmarking dalam Meningkatkan Kinerja Institut Agama Islam di Indonesia." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5.1 (2020): 173-199. DOI: <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-10>
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2016, tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. *pdf*
- Maisaroh, Siti. (2005) "Pengaruh Manajemen Mutu Layanan terhadap Kepuasan Peserta Didik di Universitas PGRI Yogyakarta." *Laporan Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Nasution, M. Nur. (2001) "Manajemen Mutu Terpadu. Total Quality management" (Jakarta: Ghalia Indonesia), 15
- Hasan. Nur, (1994) *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum Untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan* (Jakarta: PT. Sindo), hlm. 390.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah pasal 6 ayat 1. *pdf*
- Permana, Anggit Yoga, and Fitri Arianti. (2012) *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Referensi Data Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020) https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=050700&level=2.
- Rahmawati. Wahyu. (2019) (<https://nasional.kontan.co.id/news/selain-cetak-biru-pendidikan-ini-tiga-program-mendikbud-nadiem-tahun-2020>)
- Sidaq. (2019) Hadrah merupakan kesenian Islam yang didalamnya berisi shalawat. <https://www.laduni.id/post/read/54319/hadrah-merupakan-kesenian-islam-yang-di-dalamnya-berisi-shalawat.html>
- Sumarni. (2013). Potret Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah. *Jurnal Edukasi KEMENAG*. Volume 11, Nomor 3, Desember 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.32729/edukasi.v11i3.417>
- Trisnawati, Nika Fetria dan Sundari. (2020). Efektifitas Model Problem Based Learning dan Model Group Investigation dalam Meningkatkan Karakter Anti Korupsi. *MOSHARAF: Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 9 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v9i2.637>

- Tharaba, M. Fahim. "Mencari Model Pendidikan Karakter Di Sekolah." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 5.1 (2020): 66-81. DOI: 10.18860/jmpi.v5i1.8750
- Tim Riset CNBC Indonesia. (2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217142358-4-138395/ipm-ri-naik-tapi-masih-kalah-sama-tetangga>.
- Usman, Husaini. (2014) Peranan dan Fungsi Kepala Sekolah/Madrasah. *Jurnal PTK DIKMEN* Vol. 3 No. 1
- Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.pdf
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pdf
- Umam, Muhamad Khoirul. (2019) "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah* 6.2, 62-76.
- Wardiyanti, Koes, and Ihwan Susila. (2016) Eksplorasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah di SMK Negeri 4 Surakarta. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yunus. Syarif. (2020) <https://kumparan.com/syarif-yunus/potret-pendidikan-indonesia-siapa-yang-harus-berbenah-1tKr0bDEZwG/full>.
- Zulian Yamit. (2004) *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa* (Yogyakarta: Ekonisia), 7

Wawancara

- Wawancara dengan Sekretaris KKM Kec. Deket Bapak Suliadi, S.Pd tanggal 15 September 2020
- Wawancara dengan Bapak Kholil, S.Pd Kepala Madrasah MI Islamiyah tanggal 10 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Riduwan, S.E Kepala Madrasah MI Minhajul Huda tanggal 10 Oktober 2020
- Wawancara dengan Bapak Musta'in, M.Pd Kepala Madrasah MI Islamiyah. Dinoyo tanggal 12 Oktober 2020